

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu isu yang selalu menjadi permasalahan utama oleh banyak negara di dunia. Upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kemiskinan diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat (Sinurat, 2023). Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai penghasilan rendah yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat untuk tinggal (Atina Titania et al., 2022.). Berbagai studi yang telah dilakukan memberikan penjelasan bahwa angka kemiskinan yang tinggi mencerminkan rendahnya taraf hidup masyarakat, dengan kata lain kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan di berbagai aspek kehidupan (Amri & Masbar, 2019).

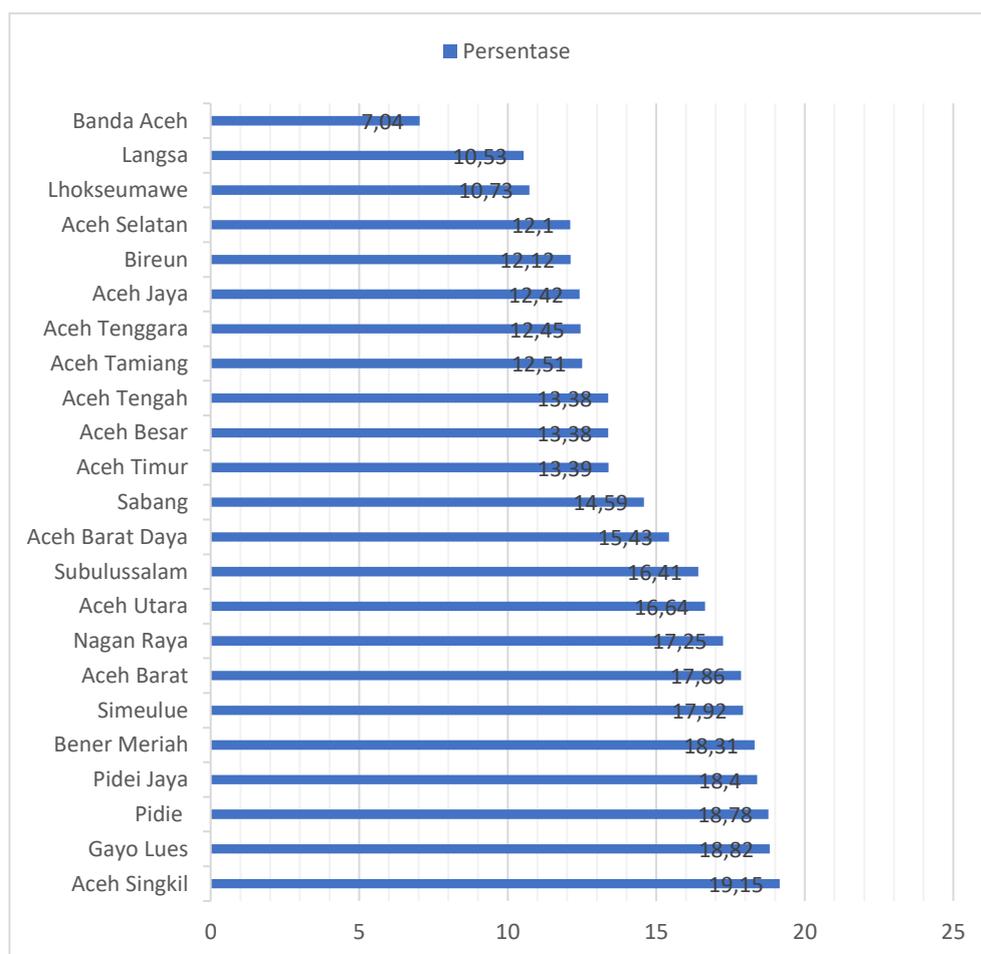
Indonesia sebagai satu negara berkembang hingga sekarang masih terus dihadapkan pada masalah serius yaitu pengentasan kemiskinan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 tercatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,36% dari total jumlah penduduk, yang setara dengan dengan 25,90 juta orang yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan masih terdapat jutaan masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

Banyak provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan diatas nilai persentase kemiskinan nasional, salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki

tingkat kemiskinan di atas persentase kemiskinan nasional adalah Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh, yang terletak di ujung Pulau Sumatera, mencatatkan angka kemiskinan sebesar 14,45% pada tahun 2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai sekitar 806,75 ribu jiwa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan persentase tersebut, Aceh menempati posisi sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Sumatera.

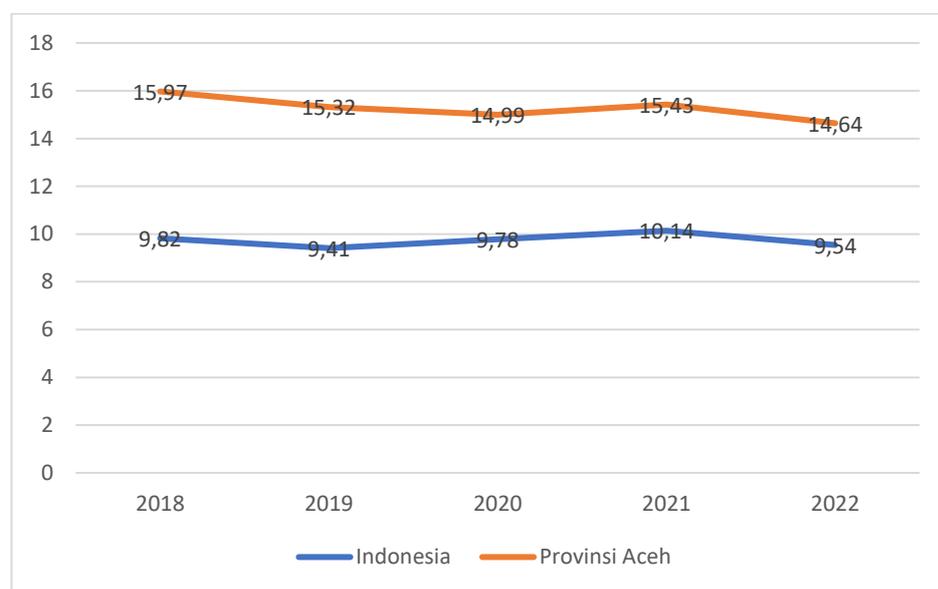
Gambar 1. 1 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Pada tahun 2023 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh adalah kabupaten Aceh Singkil sebesar 19,15%, dan yang terendah adalah Kota Banda Aceh dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,04%.

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Nasional dan Tingkat kemiskinan Provinsi Aceh (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, mengalami perubahan antara tahun 2018 hingga 2023. Secara umum, Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Tahun 2018 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 15,97% lebih tinggi 6,15 %, tahun 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tercatat sebesar 15,32% lebih tinggi 5,91% dibandingkan dengan tingkat nasional, kemudian sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 14,99%. Lebih tinggi 5,21% dibandingkan dengan nasional. Pada tahun 2021, angka

kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan menjadi 15,33%, lebih tinggi 5,19% dibandingkan dengan tingkat nasional. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang dengan tingkat kemiskinan menjadi 14,64% dan lebih tinggi 5,1 % dibandingkan dengan tingkat nasional, berlanjut pada tahun 2023, dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh kembali turun menjadi 14,45% yang lebih tinggi 5,09 %.

Hingga saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan serta menanggulangnya guna terciptanya pembangunan. Namun, penelitian yang secara khusus membahas dari aspek gender dalam mengurangi kemiskinan masih sedikit (Kurniasih et al., 2022). Perempuan memiliki peran dan kontribusi aktif untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi oleh kelompok masyarakat khususnya yang berada pada kategori miskin (Nikolaou, 2019).

Penelitian terdahulu telah menganalisis terkait gender dan menunjukkan hasil bahwa perempuan memegang peran penting dalam mendorong ekonomi, terutama dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian-penelitian terdahulu yang mengeksplorasi dampak kesetaraan gender terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah dan menemukan fakta bahwa perempuan lebih rentan jatuh ke dalam kemiskinan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor (Liu, 2019). Para ilmuwan memandang bahwa kaum Perempuan turut memainkan peran dalam menunjang perekonomian. Kenyataan menunjukkan bahwa perempuan secara global memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Todaro & Smith, 2011).

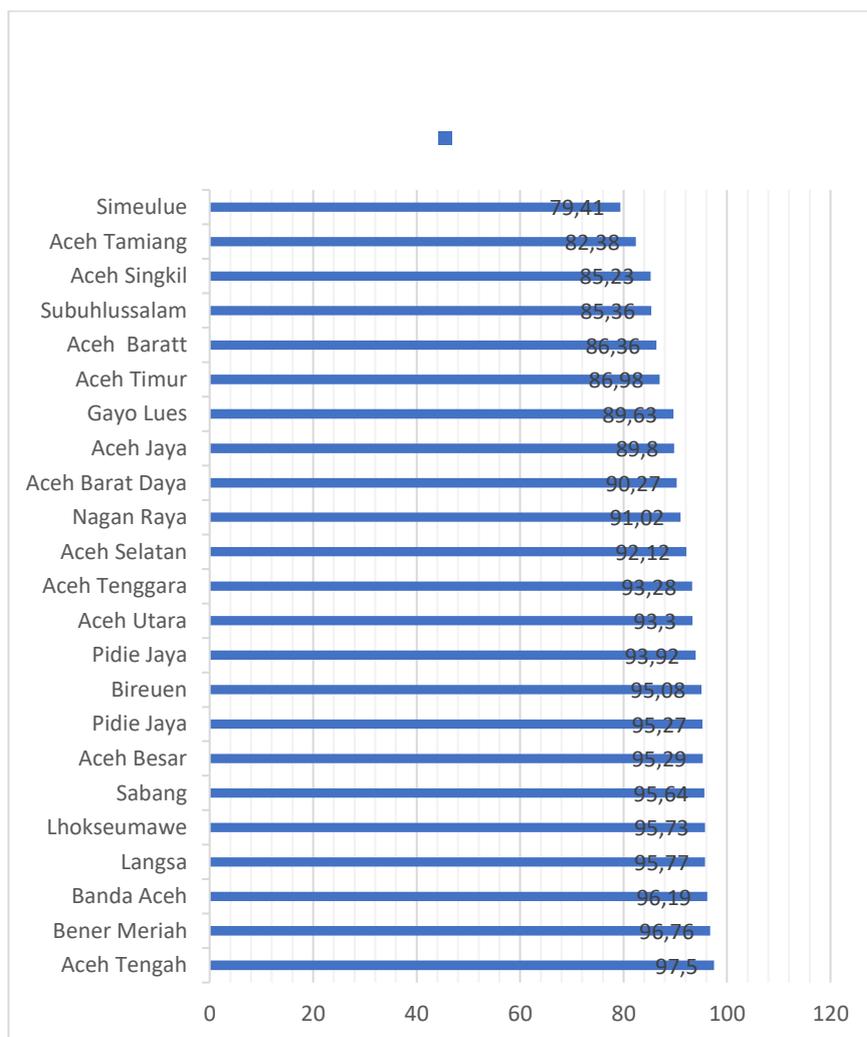
Hasil studi yang dilakukan oleh (Klasen & Lamanna, 2009) menunjukkan bahwa Upaya untuk mengurangi ketimpangan gender khususnya dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Ketidaksetaraan gender yang terus berlangsung akan membatasi potensi perempuan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sehingga memperlambat proses pengurangan kemiskinan secara keseluruhan.

Pada Provinsi Aceh, ditepapkan instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 tahun 2014 tentang aturan pekerjaan bagi Wanita yang hanya dapat melayani hingga jam tertentu. Oleh sebab itu beberapa kota di Aceh menerapkan peraturan tersebut, seperti kota Lhoksumawe yang membatasi jam kerja perempuan hingga pukul 21.00, dan terdapat juga instruksi wali kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2015 tentang pembatasan jam kerja perempuan di sektor wisata, rekreasi, café, dan sarana olahraga. Menetapkan jam kerja hingga pukul 23.00. Hal ini tentu membatasi perempuan untuk dapat bekerja diatas jam kerja yang sudah ditetapkan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG dikembangkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun lebih menekankan pada kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan. Indikator ini dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh kesetaraan gender terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Namun, IPG secara khusus menyoroti kesenjangan atau ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga mencerminkan sejauh mana pembangunan manusia berlangsung secara setara antara kedua jenis kelamin (Nurul

Fajriyyah & Budiranta I Nyoman, 2015). Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh (Abd & Abdul, 2023) IPG memiliki dampak terhadap tingkat kemiskinan dan memiliki korelasi yang negatif.

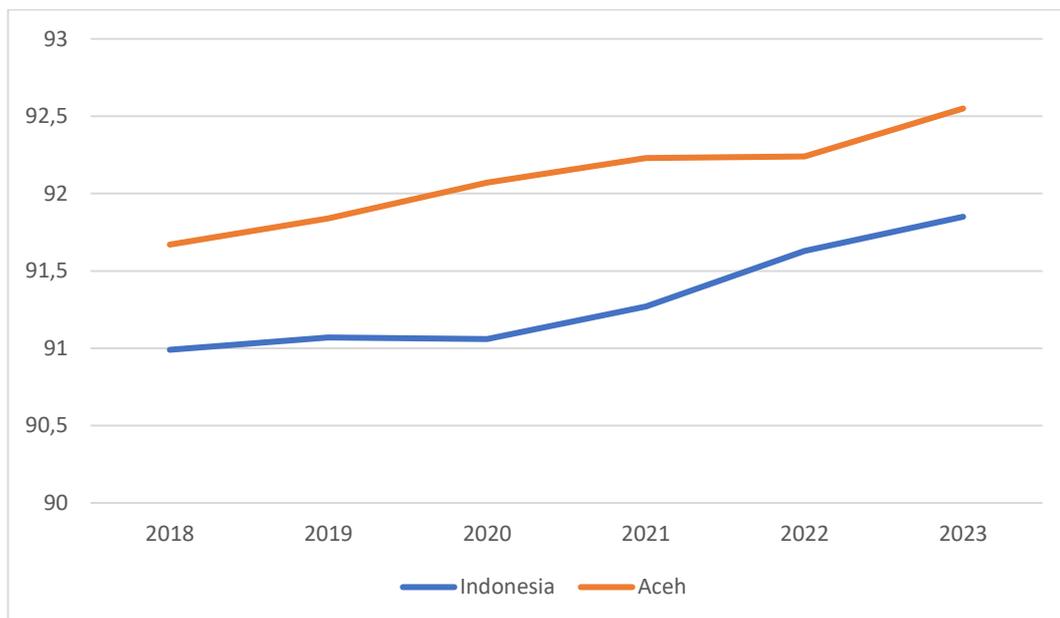
Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar 1.3 diketahui bahwa nilai Indeks IPG di Provinsi Aceh berbeda-beda setiap daerah. Daerah dengan IPG tertinggi adalah Kabupaten Aceh Tengah sebesar 97,5%, dan yang terendah adalah Kabupaten Simeulue sebesar 79,41%.

Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Gender Nasional dan Provinsi Aceh (%)



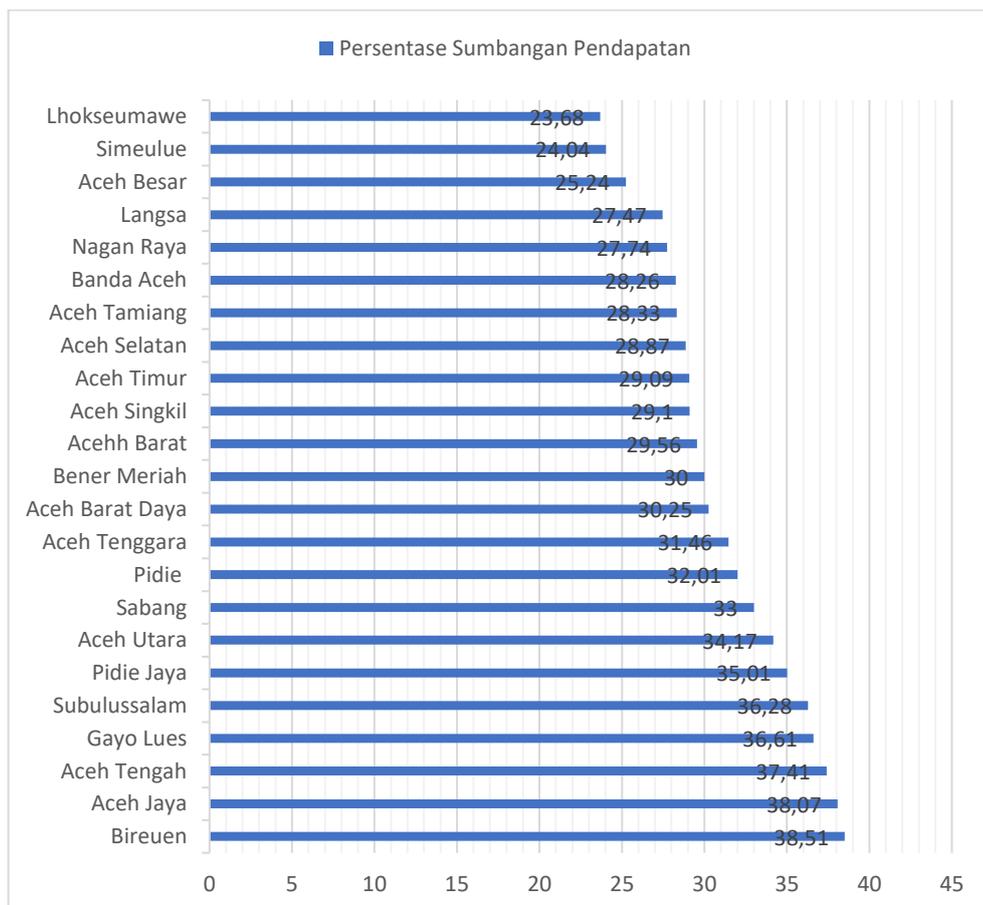
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel gambar 1.4 IPG di Provinsi Aceh mulai tahun 2018 sampai 2023 memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat nasional, seharusnya ketika IPG tinggi hal ini akan menurunkan angka kemiskinan. Ditinjau mulai pada tahun 2018 IPG sebesar 91,5% dan lebih tinggi 0,5% dibandingkan tingkat nasional, pada 2019 IPG sebesar 91,84% berbeda 0,77% dengan tingkat nasional, kemudian mengalami peningkatan pada 2020 dengan nilai IPG sebesar 92,07% dan berbeda 1,01% dengan tingkat nasional, kemudian pada tahun 2021 dengan nilai IPG sebesar 92,23% dan berbeda 0,96% dengan tingkat nasional, Kemudian pada tahun 2022 dengan IPG sebesar 92,24 berbeda 0,61% dengan tingkat nasional dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dengan IPG sebesar 92,55% dan berbeda 0,7% dengan tingkat nasional.

Selain IPG, sumbangan pendapatan perempuan berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh yang di nilai dari aspek gender. Ketika

perempuan turut aktif dalam kegiatan ekonomi dan memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan maka mereka berkontribusi dalam pendapatan rumah tangga. Hal ini akan memperkuat perekonomian keluarga yang tidak hanya mengandalkan penghasilan yang didapat oleh suami (Adnan Gunawan dan Amri khairul, 2020). Oleh sebab itu, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengurangi angka kemiskinan adalah dengan mendorong berbagai kegiatan atau aktivitas yang memiliki tujuan dalam peningkatan pendapatan perempuan (Amri & Masbar, 2019)

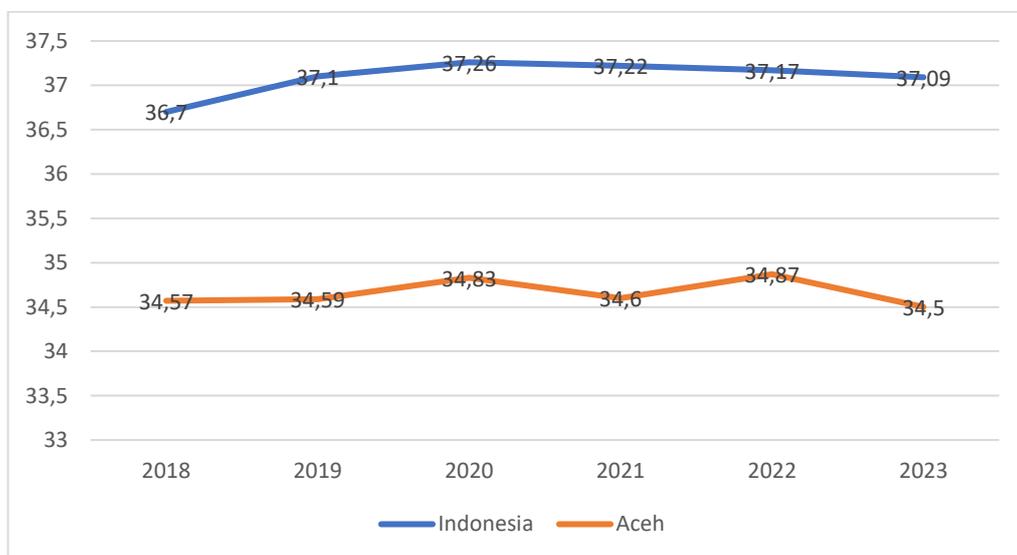
Gambar 1. 5 Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar 1.5 diketahui pada tahun 2023 sumbangan pendapatan perempuan di setiap daerah di Provinsi Aceh berbeda-beda. Daerah dengan sumbangan pendapatan perempuan tertinggi adalah Kabupaten Bireuen dengan nilai sebesar 38,15% dan yang terendah adalah Kota Lhokseumawe sebesar 23,68%.

Gambar 1. 6 Sumbangan Pendapatan Perempuan Indonesia dan Provinsi Aceh



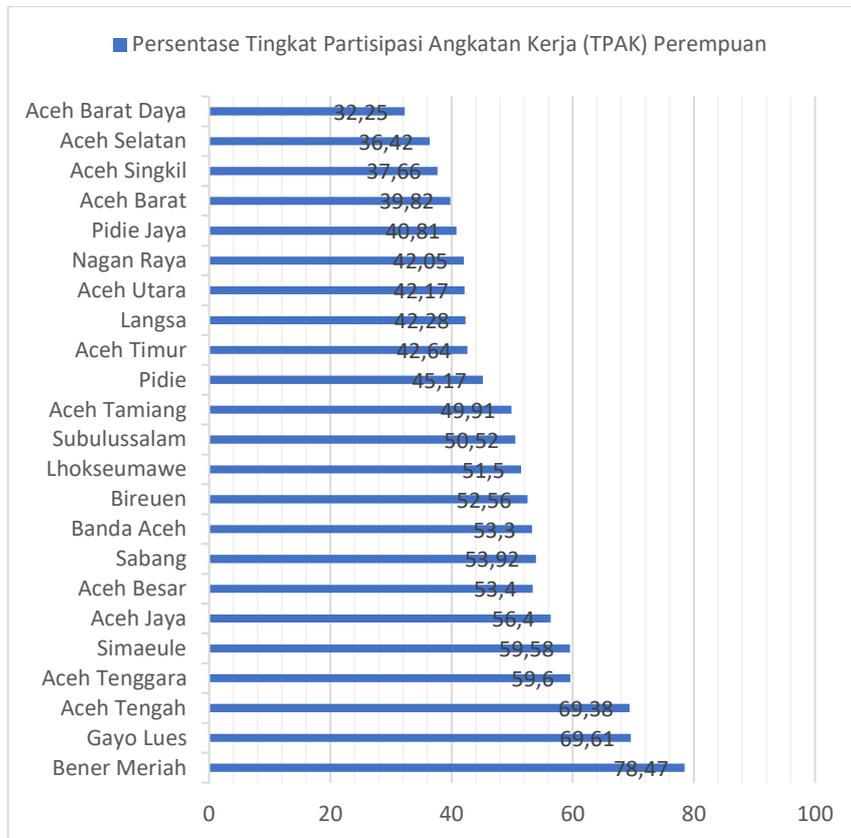
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar 1.6 menunjukkan sumbangan pendapatan perempuan di Provinsi Aceh pada tahun 2018 sampai 2023 yang berubah setiap tahunnya Selain itu juga, melalui grafik ini diketahui bahwa pada tahun 2018 sumbangan pendapatan Perempuan di Aceh sebesar 34,57% dan lebih rendah 2 % dibandingkan dengan nasional,t ahun 2019 sampai 2023 sumbangan pendapatan perempuan provinsi aceh berada dibawah sumbangan pendapatan perempuan nasional. Dapat ditinjau bahwa di Provinsi Aceh pada tahun 2019 sumbangan pendapatan perempuan sebesar 34,6% lebih rendah sebesar 2,51% dibandingkan dengan tingkat nasional, dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 34,8% lebih rendah

2,43% dibandingkan dengan tingkat nasional, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 34,6% lebih rendah 2,6 % dibandingkan dengan tingkat nasional, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sumbangan pendapatan perempuan menjadi 34,8 lebih rendah 2,3% dibandingkan dengan tingkat nasional, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2023 menjadi 34,5% lebih rendah 2,59 % dibandingkan dengan tingkat nasional.

Faktor lain yang dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur dalam mengukur kemiskinan dari aspek gender adalah tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang berada dalam usia kerja yang ikut andil dalam menunjang perekonomian (Sari & Sugiharti, 2022).

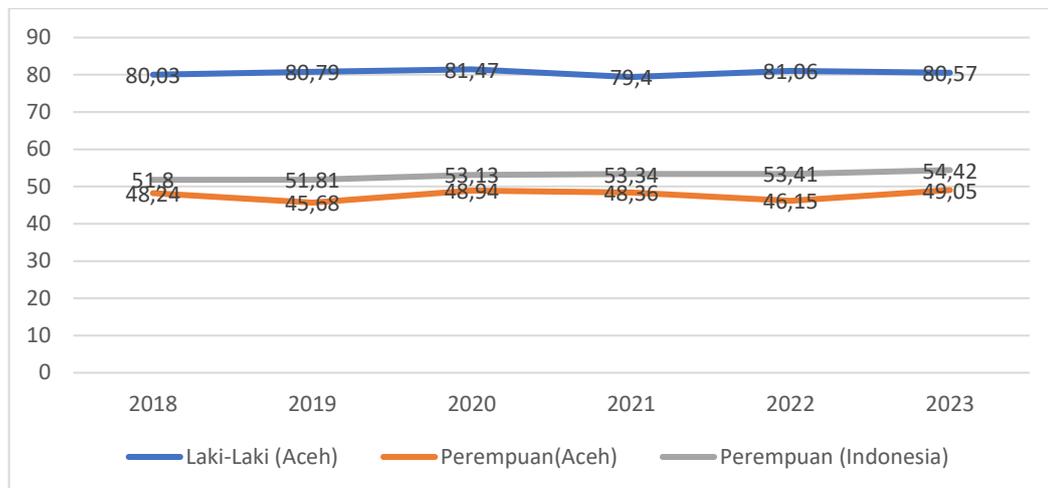
Gambar 1. 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar 1.7 diketahui bahwa TPAK perempuan tahun 2023 di Provinsi Aceh berbeda tiap daerah. Daerah dengan sumbangan pendapatan perempuan tertinggi adalah Kabupaten Bener Meriah dengan nilai sebesar 78,47%, dan yang terendah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 32,25 %.

Gambar 1. 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia dan Provinsi Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar 1.8 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 hingga 2023, TPAK antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan di Provinsi Aceh menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. Data menunjukkan bahwa TPAK perempuan di Provinsi Aceh masih berada di bawah TPAK perempuan secara nasional. Pada tahun 2018 TPAK laki-laki sebesar 80,33 sementara perempuan hanya 48,24% lebih rendah sebesar 3,56% dibandingkan dengan tingkat nasional, tahun 2019 TPAK laki-laki tercatat sebesar 80,79%, sementara perempuan hanya mencapai 45,68% lebih rendah 6,13 % dibandingkan dengan tingkat nasional. Pada tahun 2020, angka ini sedikit meningkat dengan TPAK laki-laki sebesar 81,47% dan perempuan sebesar 48,94% lebih rendah 4,19% dibandingkan dengan tingkat nasional. Pada tahun 2021, TPAK laki-laki menurun sedikit menjadi 79,4%, sementara perempuan tetap berada di angka 48,46% lebih rendah 4,98 % dibandingkan dengan tingkat nasional. Tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan, dengan TPAK laki-laki sebesar 81,06%, dan perempuan sebesar 46,15% lebih rendah 7,28 % dibandingkan dengan tingkat nasional. Terakhir, pada

tahun 2023, TPAK laki-laki tercatat sebesar 80,57%, sementara perempuan hanya mencapai 49,05% lebih rendah 5,37% dibandingkan dengan tingkat nasional. Angka-angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang dalam partisipasi angkatan kerja.

Berdasarkan uraian data sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesetaraan gender berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi pemilihan topik ini antara lain: (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Aceh belum mencapai nilai ideal, yakni 1, yang mencerminkan kesetaraan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menandakan masih adanya ketimpangan gender; (2) kontribusi pendapatan perempuan masih tergolong rendah dibandingkan laki-laki, yang mencerminkan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi perempuan; dan (3) terdapat kesenjangan yang cukup mencolok dalam tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan, di mana partisipasi perempuan masih tertinggal. Dengan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat tema "Analisis Peran Kesetaraan Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh," dengan harapan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kesetaraan gender dan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh Sumbangan pendapatan perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?

3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sumbangan pendapatan perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.4 Ruang Lingkup

Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, penelitian ini memiliki batasan masalah untuk menjaga fokus pada pembahasan. Fokus utama penelitian ini adalah variabel terikat, yaitu kemiskinan, sedangkan variabel bebas yang akan dianalisis meliputi Indeks Pembangunan Gender (IPG), sumbangan pendapatan perempuan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam memahami faktor penyebab kemiskinan khususnya dalam aspek gender, serta penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam memahami penyebab-penyebab kemiskinan.